



**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021**

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju Kepulauan Riau "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya" periode 2021 – 2026.

Tanjungpinang, Juni 2021
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670306 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI SEKRETARIAT DPRD.....	7
2.1. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	8
2.2. Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	8
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	23
2.5. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	24
2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III Tujuan dan Sasaran.....	38
3.1. Prioritas Pembangunan Nasional.....	38
3.2. Arah Kebijakan Tahun 2022 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 belum di tetapkan.....	40
3.3. Tujuan dan sasaran Renja Sekretaria DPRD.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	43

BAB V	PENUTUP.....	59
--------------	---------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut,

setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rancangan Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) dalam penyusunannya sudah mempedomi peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di provinsi kepulauan riau, ada 4 (empat) kegiatan dan 2 program terkait pengarusutamaan gender di Renja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2022 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di dasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan ke sekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ke sekretariatan DPRD. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun

Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi acuan dan landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49) ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019;
22. Surat Edaran Tahun 2020 Gubernur Nomor: 800/470/BKPSDM/SET tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
23. Surat Edaran Tahun 2021 Gubernur Nomor: 050/0386/BPPP/SET tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra.
3. Sebagai alat ukur dalam melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kinerja

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI SEKRETARIAT DPRD

- 2.1. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 2.2. Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.4. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN;

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Arah Kebijakan Tahun 2022 Berdasarkan Dokumen Rancangan Awal Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026
- 3.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

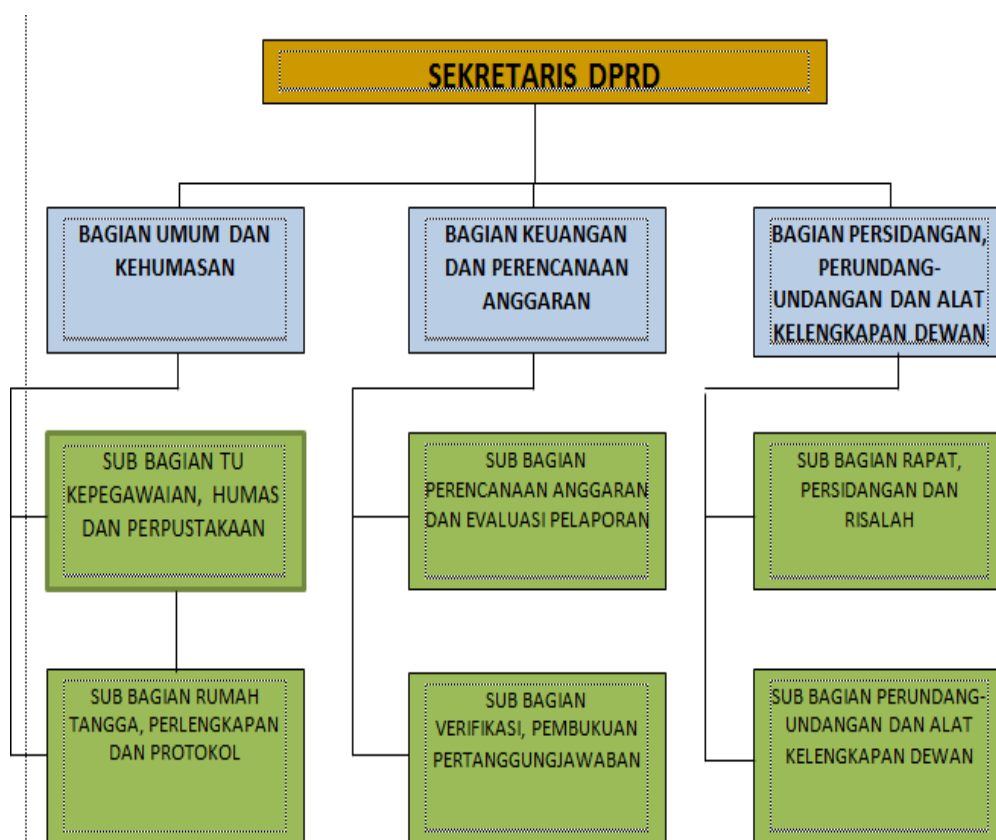
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI SEKRETARIAT DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

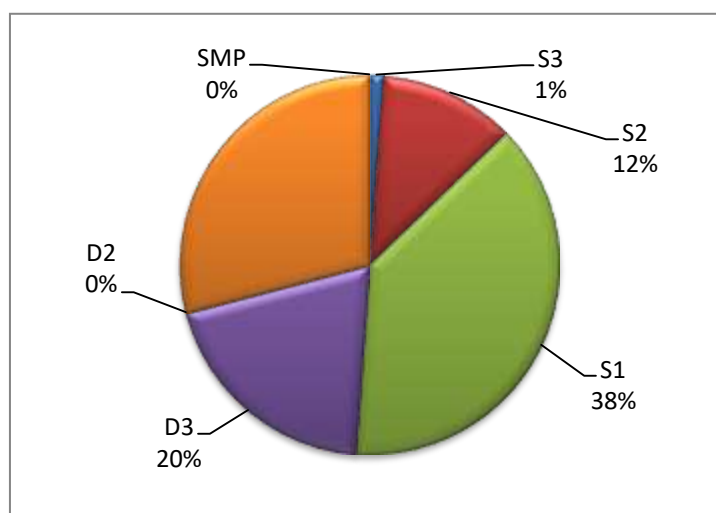
- Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Fungsi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan dalam bagan Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) orang, kemudian Pegawai Tidak Tetap sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) orang. Total Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas yang efektif menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 309 (Tiga Ratus Sembilan) orang. Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :



2.2 Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

Pada tanggal 9 September 2019 menjadi sejarah bagi perjalanan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengingat pada tanggal tersebut lembaga ini diresmikan yang ditandai dengan dilantiknya sebanyak 45 orang wakil rakyat. Pada hasil pemilu legislative tahun 2019 menjadi anggota tetap DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2019 s.d 2024. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tersebut merupakan perwakilan dari 10 (Sepuluh) partai politik yang berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada 5 (Lima) daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari ke 10 Partai Politik dan 5 Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019 s.d 2024:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH DPRD
1	PDI-P	8 ANGGOTA
2	PARTAI GOLKAR	8 ANGGOTA
3	PKS	6 ANGGOTA
4	PARTAI NASDEM	6 ANGGOTA
5	PARTAI GERINDRA	4 ANGGOTA
6	PARTAI HANURA	3 ANGGOTA

7	DEMOKRAT	4 ANGGOTA
8	PPP	1 ANGGOTA
9	PAN	2 ANGGOTA
10	PKB	3 ANGGOTA

Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2019 s.d 2024 berdasarkan daerah pemilihan :

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH DPRD
1	DAPIL 1 (SATU) TANJUNGPINANG	5 ANGGOTA
2	DAPIL 2 (DUA) BINTAN DAN LINGGA	6 ANGGOTA
3	DAPIL 3 (TIGA) KARIMUN	6 ANGGOTA
4	DAPIL 4 (BATAM A)	10 ANGGOTA
5	DAPIL 5 (BATAM B)	10 ANGGOTA
6	DAPIL 6 (BATAM C)	5 ANGGOTA
7	DAPIL 7 (TUJUH) NATUNA, ANAMBAS	3 ANGGOTA

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian Kinerja Tahun Lalu pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode Pelaksanaan: 2020

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan		Satuan
						Target Renja OPD tahun 2020	Realisasi Renja OPD tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(4+5+7+9)	11=(10/4)	
I	4.01.4.01.4.01	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik									
	4.01.4.01.4.01	Kegiatan :										
1	4.01.4.01.4.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
2	4.01.4.01.4.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	4.0	Bulan
3	4.01.4.01.4.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	12	12	0	0	0	0	12	1.0	Bulan

4	4.01.4.01.4.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
5	4.01.4.01.4.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Pendukung Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
6	4.01.4.01.4.01.20	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Rutinitas Perkantoran	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
7	4.01.4.01.4.01.22	Rapat-rapat Internal Eksternal Kedalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
8	4.01.4.01.4.01.23	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
II	4.01.4.01.4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas									
	4.01.4.01.4.02	Kegiatan :										
1	4.01.4.01.4.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD	Tersedianya Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD	0	12	0	0	0	0	12	3.0	Bulan

2	4.01 . 4.01.4 . 02. 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
3	4.01 . 4.01.4 . 02. 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Sekretariat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Sekretariat	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
5		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan DPRD Provinsi Kepri	0	0	0	0	0	0	0	0	Bulan
6	4.01 . 4.01.4 . 02. 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
7	4.01 . 4.01.4 . 02. 04	Peningkatan Sarana Humas dan Informasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Sarana Humas dan Informasi DPRD Provinsi Kepri	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
8	4.01 . 4.01.4 . 02. 06	DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Bangunan Serbaguna Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
9	4.01 . 4.01.4 . 02. 07	DED Pengadaan Kapal Ferry Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Kapal Ferry Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket

10	4.01 . 4.01.4 . 02. 08	DED Pengadaan Elevator Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya DED Elevator Kantor DPRD Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
11	4.01 . 4.01.4 . 02. 09	Pengadaan Elevator Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Pengadaan Elevator Kantor DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
12	4.01 . 4.01.4 . 02. 10	Kegiatan Pengadaan Aplikasi dan Server Data Base Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Aplikasi dan Server Data Base Produk Hukum Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	Paket
13		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	12	12	48	4.0	Bulan
III	4.01 . 4.01.4 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur Daerah yang baik									
	4.01 . 4.01.4 . 03	Kegiatan :										
	4.01 . 4.01.4 . 03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Berserta Perlengkapannya	1	1	1	1	100	1	4	4.0	Paket

IV	4.01 . 4.01.4 . 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Baik									
	4.01 . 4.01.4 . 04	Kegiatan :										
	4.01 . 4.01.4 . 04 . 08	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD	Tersusunnya LAKIP sekretariat DPRD	6	6	6	6	100	6	24	4.0	Laporan
	4.01 . 4.01.4 . 04 . 13	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP sekretariat DPRD	25	25	25	25	100	25	100	4.0	Dokumen
		Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan, Triwulan dan Semester	Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan, Triwulan dan Semester									
IV	4.01 . 4.01.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'Meningkatnya Kapsitas Sumber Daya Apartur yang Baik									
	4.01 . 4.01.4 . 05	Kegiatan :										
1	4.01 . 4.01.4 . 05. 01	Kegiatan Penunjang Keprotokoleran	Terlaksanya Kegiatan Peenunjang Keprotokoleran	0	1	0	0	0	1	1	1	Kali

2	4.01.4.01.4.05.02	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan	3	3	0	0	0	3	6	2	Kali(Or g)
3	4.01.4.01.4.05.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan	3	3	0	0	0	3	6	3.0	Kali(Or g)
4	4.01.4.01.4.05.04	Penunjang Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
5	4.01.4.01.4.05.05	Peningkatan Kapasitas Pegawai Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pegawai Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	12	0	0	0	0	12	12	1.0	Bulan(Org)
6	4.01.4.01.4.05.06	Pelatihan Operator dan Sosialisasi Aplikasi Produk hukum	Terlaksananya Pelatihan Operator dan Sosialisasi Aplikasi Produk hukum	1	0	0	0	0	0	0	0	Kali
7	4.01.4.01.4.05.07	Peningkatan Kapasitas Humas dan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Humas dan Sekretariat	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali

VI	4.01 . 4.01.4 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
	4.01 . 4.01.4 . 07	Kegiatan :										
1	4.01 . 4.01.4 . 07 . 01	Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Hearing Dialog dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
3	4.01 . 4.01.4 . 07 . 02	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3	3	3	3	100	3	12	4.0	Kali
4	4.01 . 4.01.4 . 07 . 03	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
5	4.01 . 4.01.4 . 07 . 04	Rapat Kerja Pimpinan DPRD Se-Indonesia	Terlaksananya Rapat Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan

6	4.01 . 4.01.4 . 07 . 05	Kegiatan Parlementaria	Terlaksananya Kegiatan Parlementaria	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
7	4.01 . 4.01.4 . 07 . 06	Rapat - rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau	6	6	6	6	100	6	24	4.0	Kali
8	4.01 . 4.01.4 . 07 . 07	Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD	Terlaksananya Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	2	2	2	0	0	2	6	3.0	Kali
9	4.01 . 4.01.4 . 07 . 08	Kegiatan Penunjang Fraksi DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
	4.01 . 4.01.4 . 07 . 09	Penunjang Kehumasan dan Dokumentasi Anggota DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Kehumasan dan Dokumentasi DPRD	12	12	12	12	100	12	46	4.0	Bulan

12	4.01 . 4.01.4 . 07 . 08	Publik Hearing DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Publik Hearing	12	12	12	0	0	12	24	2.0	Bulan
10	4.01 . 4.01.4 . 07 . 09	Penunjang Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitas Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
11	4.01 . 4.01.4 . 07 . 12	Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Prov Kepr	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
12		Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Terlaksananya Indeks DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	100	1	4	4.0	Kali
13		Pembuatan Profil DPRD Provinsi Kepri	Terlaksananya dan Tersusunnya Profil DPRD	0	150	0	0	0	0	150	150	Buku
14		Penguatan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penguatan Peran dan Pungsi Set-DPRD	12	12	12	12	0	12	36	3.0	Kali
	4.07 . 4.01.4 . 08	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP									
1	4.07 . 4.01.4 . 08 . 01	Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD	Jumlah ranperda dan produk hukum yang di bahas	12	16	12	9	75.00	14	37	3.08	Produk Hukum

2	4.07 . 4.01.4 . 08. 02	Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah perda inisiatif yang tersusun	4	1	1	1	100	5	7	2.3	Perda
3	4.07 . 4.01.4 . 08. 03	Pembuatan Naskah Akademis	Jumlah dokumen naskah akademis	4	2	2	2	100	5	9	2.2	Dokumen
4	4.07 . 4.01.4 . 08. 04	Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dilakukan sinkronisasi terhadap produk hukum	12	12	0	0	0	0	12	1.0	Bulan
VIII	4.01.4.01.4.13	Program Pengembangan Data / Informasi										
1	4.01.4.01.4.13. 01	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	Tersedianya Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
IX	4.01 . 4.01.4 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik									
	4.01 . 4.01.4 . 21	Kegiatan :										
1	4.01 . 4.01.4 . 21 . 08	Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100	100	100	100	100	100	400	4.0	Buku

2		Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	0	1	0	0	0	0	1	1	Dokum en
3	4.01 . 4.01.4 . 21 . 09	Pemantauan Prosedur Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksana Pemantauan Prosedur Perencanaan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	0	1	3	3.0	Dokum en
4	4.01 . 4.01.4 . 21 . 10	Pemantauan Prosedur Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pemantauan Prosedur Keuangan Sekretariat DPRD	1	1	1	1	0	1	3	3.0	Dokum en
5	4.01 . 4.01.4 . 21 . 11	Evaluasi Kebijakan Perencanaan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan Perencanaan	3	3	3	3	100	3	12	4.0	kali
6	4.01 . 4.01.4 . 21 . 12	Evaluasi Kebijakan Keuangan Sekretariat DPRD	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan Keuangan	3	3	3	3	100	3	12	4.0	kali
7	4.01 . 4.01.4 . 21 . 13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP Sekretariat DPRD	Tersedianya Dokumen SOP Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Dokum en
8		Sosialisasi Standart Operasional Prosedur Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Sosialisasi SOP Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali

9		Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Tersusunnya Draft SOP DPRD DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali
10		Kajian Beban Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kajian Beban Kerja Sekretariat DPRD	0	1	0	0	0	0	1	1.0	Kali
X		Peningkatan Publikasi Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Publikasi Komunikasi dan Informasi									
1	4.07 . 4.01.4 . 08. 01	Kegiatan Parlementaria	Terpenuhinya kegiatan publikasi eksternal DPRD	12	12	12	12	100	12	48	4.0	Bulan
2	4.07 . 4.01.4 . 08. 02	Kegiatan Reses	Terlaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3	3	3	3	100	3	12	4.0	Kali

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran berupa *input*, *output* dan *outcome*. Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana, indikator *output* bervariasi tergantung dari apa yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, *outcome* pun bervariasi tergantung pula dari *output* yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kepri telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran

No	Indikator	Satuan	Realisasi						Target Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skors		0	62	64	66	68	70	72	70
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a

2.5 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dan penelaahan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan maka dapat disampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Umum dan Kehumasan	1. Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat 2. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai 3. Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran 4. Minimnya sarana baca dan referensi 5. Pola penanganan keprotokolan yang belum profesional dan tepat 6. Tidak terkelolanya data base dokumentasi
Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan	1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal 2. SDM yang kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.
Kuangan dan Perencanaan Anggaran	1. Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data 3. Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan kebutuhan perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan sumberdaya aparatur	100%	86,699,600,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan kebutuhan perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan sumberdaya aparatur	100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	900,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	1 Dokumen		

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokument	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokument		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	200,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	45,950,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	44,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun		
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	850,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan		
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi	frekuensi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	200,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi	frekuensi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan		

		Kepri	SKPD				Kepri	SKPD			
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan	1,500,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pakaian Dina beserta atribut	178 stel	650,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pakaian Dina beserta atribut	178 stel		
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	450,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang		
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	200,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	22,746,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan		
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Unit	1,850,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Unit		
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	10,396,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Kunjungan Tamu	12 Bulan	9,000,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Kunjungan Tamu	12 Bulan		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1,500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan		3,000,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan			
19	Pengadaan Mebel	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Mebel	100 Unit	400,000,000	Pengadaan Mebel	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Mebel	100 Unit		

20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	70,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit		
21	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset yang diadakan	10 Unit	680,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset yang diadakan	10 Unit		
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit		
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	850,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	12 Bulan	6,500,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	12 Bulan		
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	4,500,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%	4,100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%		

	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	12 Bulan	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12 Bulan	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1,000,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
30	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	2,020,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan			
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan		
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	100%	1,300,000,000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	100%		
34	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12 Bulan	200,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12 Bulan		
35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	225 stel	650,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	225 stel		
36	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah DPRD Melaksanakan Medical Check Up	45 orang	450,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah DPRD Melaksanakan Medical Check Up	45 orang		
9	Layanan Administrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan	703,600,000	Layanan Administrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan		
37	Fasilitasi Fraksi DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Fraksi DPRD yang di Fasilitasi (jumlah fraksi)	8 Fraksi	703,600,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Fraksi DPRD yang di Fasilitasi (jumlah fraksi)	8 Fraksi		

		Provinsi Kepri					Provinsi Kepri				
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	72 Skor	85,117,800,000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	72 Skor		
10	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Dokumen	1,000,000,000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Dokumen		
38	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
39	Pembahasan Rancangan Perda	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Ranperda yg dibahas	8 Ranperda	300,000,000	Pembahasan Rancangan Perda	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Ranperda yg dibahas	8 Ranperda		
40	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan	1 Dokumen	200,000,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan	1 Dokumen		
41	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang di fasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang di fasilitasi	1 Dokumen		
11	Pembahasan		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	Pembahasan		Jumlah Dokumen			

	Kebijakan Anggaran		Penganggara n Daerah (APBD DAN APBD P)			Kebijakan Anggaran		Penganggara n Daerah (APBD DAN APBD P)			
42	Pembahasan APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah Pembahasan APBD terfasilitasi	2 Kali	500,000,000	Pembahasan APBD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah Pembahasan APBD terfasilitasi	2 Kali		
12	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100 %	16,167,800,000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan			
43	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	45 Orang	4,500,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	45 Orang		
44	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Bulan	6,000,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Bulan		
45	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Tim	750,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Bulan		
46	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	32 orang	1,800,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Bulan		
47	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Luar Daerah dan Dalam	frekuensi Penyelenggaraan Hubungan	12 Bulan	3,117,800,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Luar Daerah dan Dalam	frekuensi Penyelenggaraan Hubungan	12 Bulan		

		Daerah Provinsi Kepri	Masyarakat				Daerah Provinsi Kepri	Masyarakat			
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	135 orangkali	33,700,000,000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	135 orangkali		
48	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	frekuensi kunjungan kerja dalam daerah	12 Bulan	4,500,000,000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	frekuensi kunjungan kerja dalam daerah	12 Bulan		
49	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen		
50	Pelaksanaan Reses	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3 Kali	29,000,000,000	Pelaksanaan Reses	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	jumlah pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	3 Kali		
14	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terlaksanaa nya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	33,750,000,000			Persentase Terlaksanaa nya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%		
51	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Bulan	33,000,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Bulan		
52	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Kinerja yang Tersusun	1 Laporan	200,000,000	Jumlah Laporan Kinerja yang Tersusun	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Jumlah Laporan Kinerja yang Tersusun	1 Laporan		

53	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Bulan	350,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	Frekuensi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Bulan		
54	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	frekuensi Fasilitasi Tugas Pimpinan	12 Bulan	200,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Luar Daerah dan Dalam Daerah Provinsi Kepri	frekuensi Fasilitasi Tugas Pimpinan	12 Bulan		

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri pada tahun 2022, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbag prov) yang berdoman pada Isu Strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2024 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat DPRD tidak ada.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum PD dan juga berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DPRD

3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

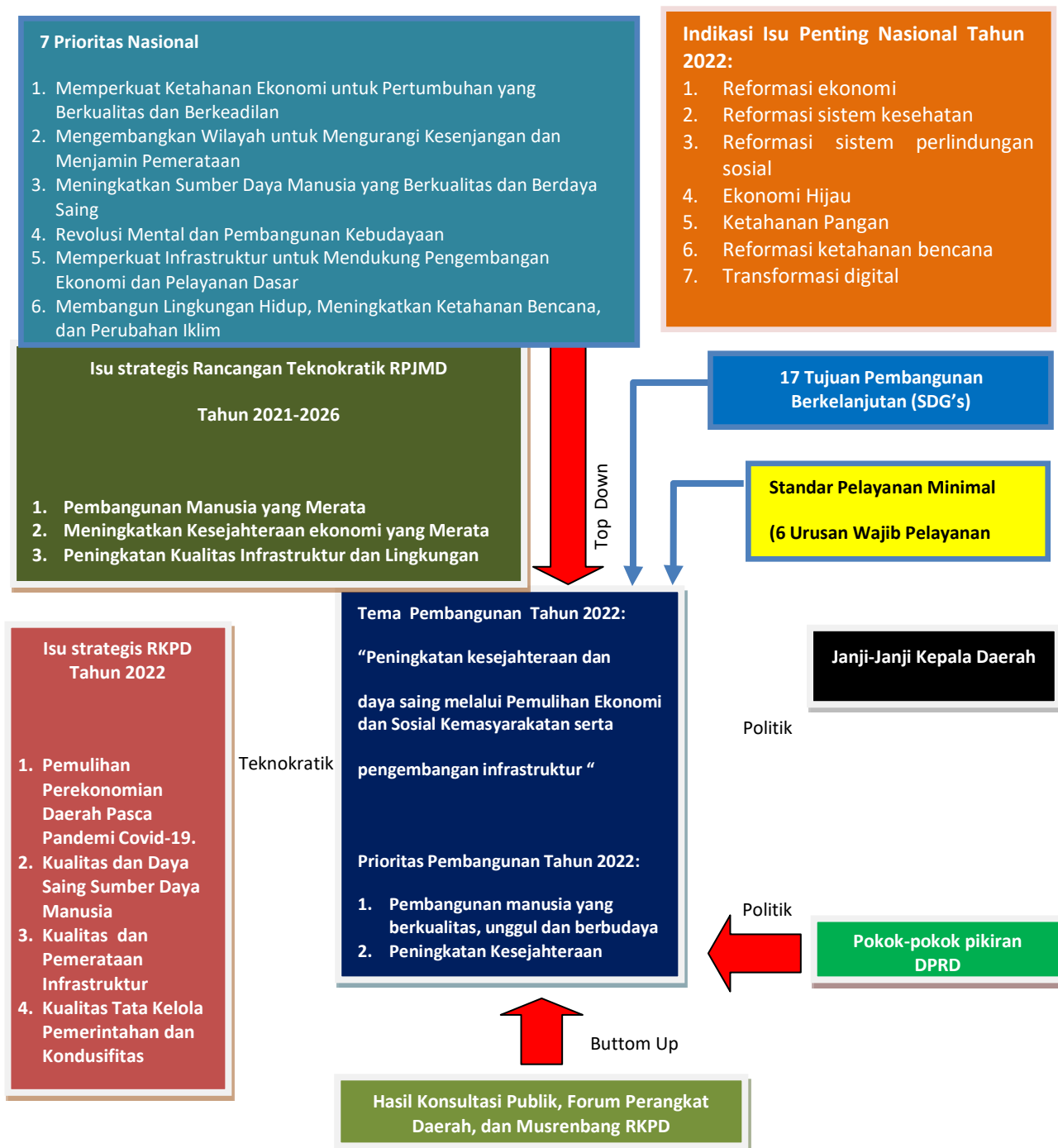
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



3.2 Arah Kebijakan Tahun 2022 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 belum di tetapkan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang Merata
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal



Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini.



3.3 Tujuan dan sasaran Renja Sekretaria DPRD

Tujuan Sekretariat DPRD dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif. Dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan terkait dengan Tujuan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. (Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif)	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dan Pelayanan Anggota DPRD sesuai SOP. (Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	72	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	72
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Setiap program memiliki indikator kinerja outcome, sedangkan kegiatan memiliki indikator kinerja output. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :**8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD****Sub Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan :**9. Layanan Administrasi DPRD****Sub Kegiatan :**

1. Fasilitasi Fraksi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**Kegiatan :****1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD****Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1. Pembahasan APBD

3. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan :

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Kegiatan :

5. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel . 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCAN TAHUN 2022						CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKAIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKAIF (Rp.)	
										PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	02				SEKRETARIAT DPRD							171,817,400,000				171,817,400,000			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							86,699,600,000				86,699,600,000			
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							900,000,000				900,000,000			
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	0 2	0 1	1.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pend apan Asli Daer ah (PA D)		1 Dokume n		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokument		100,000,000	Pend apan Asli Daer ah (PA D)		1 Dokume nt		100,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pend apan Asli Daer ah (PA D)		1 Dokume n		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									45,950,000,000					45,950,000,000	
4	0 2	0 1	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Kepulauan Riau		1 Tahun		44,500,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		1 Tahun		44,500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		850,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		850,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal

4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		frekuensi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah laporan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1,500,000,000					1,500,000,000		
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian Dina beserta atribut		Provinsi Kepulauan Riau		178 stel		650,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		178 stel		650,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Kepulauan Riau		60 Orang		450,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		60 Orang		450,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Kepulauan Riau		60 Orang		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		60 Orang		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Provinsi Kepulauan Riau		60 Orang		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		60 Orang		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							22,746,000,000				22,746,000,000			
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Kepulauan Riau		150 Unit		1,850,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		150 Unit		1,850,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		10,396,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		10,396,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Frekuensi Kunjungan Tamu		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		9,000,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		9,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		1,500,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		1,500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	01	1.07	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,000,000,000					3,000,000,000	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel		Provinsi Kepulauan Riau		100 Unit		400,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		100 Unit		400,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		15 Unit		70,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		15 Unit		70,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset yang diadakan		Provinsi Kepulauan Riau		10 Unit		680,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		10 Unit		680,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		6 Unit		1,000,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		6 Unit		1,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		6 Unit		850,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		6 Unit		850,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,500,000,000					6,500,000,000	

4	2	1	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		2,000,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		2,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	2	1	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		4,500,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		4,500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 9	4. 02. 01. 1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,100,000,000				4,100,000,000			
4	0 2	0 1	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		80,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		80,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal
4	0 2	0 1	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		20,000,000	Pendap an Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		20,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintaha n yang Optimal

4	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		80,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		80,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		1,000,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		1,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset dalam Pemeliharaan		Provinsi Kepulauan Riau		500 Unit		2,020,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		500 Unit		2,020,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		300,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		300,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		300,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							1,300,000,000					1,300,000,000		
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Frekuensi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		200,000,000	APBD		12 Bulan		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Provinsi Kepulauan Riau		225 stel		650,000,000	APBD		225 stel		650,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah DPRD Melaksanakan Medical Check Up		Provinsi Kepulauan Riau		45 orang		450,000,000	APBD		45 orang		450,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD								703,600,000					703,600,000	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Fraksi DPRD yang di Fasilitasi (jumlah fraksi)		Provinsi Kepulauan Riau		8 Fraksi		703,600,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		8 Fraksi		703,600,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								85,117,800,000					85,117,800,000	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD								1,000,000,000					1,000,000,000	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		300,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Ranperda yg dibahas		Provinsi Kepulauan Riau		7 Ranperda		300,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		8 Ranperda		300,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang di fasilitasi		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							500,000,000					500,000,000		
4	02	02	1.02	01	Pembahasan APBD		Jumlah Pembahasan APBD terfasilitasi		Provinsi Kepulauan Riau		2 Kali		500,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		2 Kali		500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							16,167,800,000					16,167,800,000		
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas		Provinsi Kepulauan Riau		45 Orang		4,500,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		45 Orang		4,500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Frekuensi Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		6,000,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		6,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Provinsi Kepulauan Riau		2 Tim		750,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		2 Tim		750,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Provinsi Kepulauan Riau		32 orang		1,800,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		32 orang		1,800,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		frekuensi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		3,117,800,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		3,117,800,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							33,700,000,000					33,700,000,000		
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		frekuensi kunjungan kerja dalam daerah		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		4,500,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan		4,500,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen		200,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumlah pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Kepulauan Riau		3 Kali		29,000,000,000	Pendapan Asli Daerah (PAD)		3 Kali		29,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD							33,750,000,000					33,750,000,000		

4	0 2	0 2	1.0 8	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		33,000,000,000	APBD		12 Bulan		33,000,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	0 2	0 2	1.0 8	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja yang Tersusun		Provinsi Kepulauan Riau		1 Laporan		200,000,000	APBD		1 Laporan		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	0 2	0 2	1.0 8	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Frekuensi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		350,000,000	APBD		12 Bulan		350,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
4	0 2	0 2	1.0 8	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		frekuensi Fasilitasi Tugas Pimpinan Pimpinan		Provinsi Kepulauan Riau		12 Bulan		200,000,000	APBD		12 Bulan		200,000,000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

BAB V

PENUTUP

RENJA – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah. Diharapkan Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan

Tanjungpinang, Juni 2021
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670306 199703 1 004